BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI ANTISIPASI PENYALAHGUNAAN KEADAAN DANA BANTUAN MELALUI PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

A. Kontribusi Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Program Keluarga Harapan

Konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih luas, termasuk mengurangi beban ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mendukung perkembangan anak. Berikut adalah beberapa cara di mana hal ini dapat terjadi :

1. Mengurangi Beban Ekonomi

Dengan memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin dan rentan, PKH dapat membantu mengurangi beban ekonomi mereka. Dana bantuan yang diterima dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian Pendidikan, dan perawatan Kesehatan, sehingga mengurangi tekanan ekonomi yang mereka hadapi.

2. Meningkatkan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Program PKH seringkali terkait dengan komitmen untuk meningkatkan akses Pendidikan dan Kesehatan bagi keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk membayar biaya Pendidikan seperti seragam, buku, dan biaya sekolah, serta biaya Kesehatan seperti pemeriksaan medis, obat-obatan dan vaksinasi.

3. Mendorong Produktifitas Masyarakat

Selain memenuhi kebutuhan dasar dana bantuan dari PKH juga dapat digunakan untuk investasi produktif, seperti membuka usaha kecil dan menambah modal untuk usaha yang sudah ada. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan serta mengurangi Tingkat kemiskinan jangka panjang.

4. Mengurangi Ketimpangan Sosial

Dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin dan rentan, PKH dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan merata, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang lebih adil untuk mencapai potensi mereka.

5. Mendukung Perkembangan Anak

Bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH juga dapat berkontribusi pada perkembangan anak-anak dalam keluarga tersebut. Misalnya, akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan anak, sementara bantuan finansial dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka seperti makanan yang bergizi, pakaian, dan perlengkapan sekolah.

6. Peningkatan Perlindungan Bagi Nasabah

Berdasarkan uraian di atas, semua kontribusi adanya Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut mungkin akan lebih meningkat apabila dibarengi dengan suatu konstruksi yang dapat menumbuhkan

perlindungan lebih bagi para keluarga penerima manfaat PKH, dimana mereka adalah berstatus sebagai nasabah pada bank penyalur program keluarga harapan yang juga termasuk dalam kelompok konsumen yang perlu dilindungi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selain dari pada itu, untuk dapat meningkatkan perlindungan bagi nasabah bank penyalur program keluarga harapan dalam hal ini adalah Bank BRI, perlu adanya sinkronisasi peraturan-peraturan terkait. Seperti halnya yang peneliti temukan yaitu terdapat ketidaksinkronan antara aturan Keputusan Dirjen Perlindungan Sosial tentang Petunjuk Teknis atau Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang telah peneliti jelaskan di penjelasan sebelumnya.

B. Hambatan Mengkonstruksikan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Program Keluarga Harapan

1. Hambatan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Hambatan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bergantung pada Kebijakan dari program itu sendiri dan Pendamping Sosial sebagai pelaksana program di lapangan. Kebijakan program telah dirancang dan diperbaharui sedemikian rupa sesuai evaluasi yang telah dilakukan dari hasil pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan sendiri tidak terlepas dari berbagai kendala yang timbul akibat proses yang rumit dan kompleks, kendala tersebut menjadi penghambat dalam keberhasilan suatu pelaksanaan bahkan dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan tersebut. Karakteristik masalah merupakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi seperti yang dikemukakan oleh Mazamanian dan Sabatier dalam Subarsono yang mengidentifikasi karakteristik masalah yang terdiri atas; 1) kesulitan teknis, 2) Keragaman perilaku kelompok sasaran, 3) Proporsi kelompok sasaran, dan 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan (Subarsono, 2008, hal. 95-96). Berdasarkan karakteristik permasalahan tersebutlah, analisis beberapa hambatan yang ditemukan di lapangan kemudian dibagi menjadi, (1) hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan; (a) ditinjau dari sebab internal; (b) sebab eksternal dari Program Keluarga Harapan (PKH); dan juga (2) hambatan dari Pendamping Sosial.

Pada pelaksanaan di lapangan, Program ini dinilai telah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan suatu program dapat dipastikan akan selalu mengalami suatu hambatan atau permasalahan, begitu pula yang terjadi pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Hal ini selaras dengan pandangan Wibawa, Purbokusumo dan Pramusinto, yang mengemukakan bahwa dalam kenyataannya tidak

selamanya kebijakan publik itu mencapai sasaran setelah dilaksanakan, walaupun sudah direncanakan sedemikian rupa. Karena pada saat dilaksanakan banyak sekali terkait dengan berbagai hal yang kompleks dan tidak mudah untuk dieliminir (Wibawa, Purbokusumo, & Pramusinto, 1994, hal. 32).

Merujuk pada pandangan Wibawa, Purbokusumo dan Pramusinto tersebut, kebijakan publik yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Dari hasil penemuan di lapangan terkait hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), diketahui bahwasanya terdapat tujuh kendala pada saat pelaksanaannya di lapangan.

Pembahasan terkait hambatan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian akan dibagi menjadi tiga kategori; ditinjau dari sebab internal, sebab eksternal dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga hambatan dari Pendamping Sosial.

a. Hambatan Sebab Internal

Berdasarkan hasil penemuan di lapangan, indikator hambatan pelaksanaan dalam kebijakan Program Keluarga Harapan, berkenaan dengan efektivitas dari kebijakan program itu sendiri termasuk mekanisme pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial PKH, seperti sebagai berikut.

- 1) Ketidaksinkronan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dengan Situsi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Arah kebijakan dari Program Keluarga Harapan mengalami gebrakan baru, yakni gerakan masal sinkronisasi data DTKS dengan situasi KPM yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya, proses evaluasi program dan pemutakhiran data para KPM tidak berjalan dengan maksimal dan seringkali mengalami kendala teknis. Seperti kembalinya nama-nama KPM yang sudah dinyatakan graduasi ke dalam portal data atau juga sejak awal pendataan DTKS tidak dilakukan dengan proses yang benar, sehingga masyarakat yang seharusnya menjadi KPM PKH, tetapi tidak menjadi Penerima Manfaat dikarenakan tidak terdata secara sempurna.

Data DTKS yang menjadi acuan atau dasar penetapan calon penerima menjadi KPM, diindikasikan tidak mencerminkan keadaan masyarakat yang sebenar-benarnya, sehingga kemudian pada saat observasi di lapangan yang dilakukan peneliti, ada beberapa contoh kasus serupa yang ditemukan. Kesalahan-kesalahan demikian seringkali memberikan dampak yang berkepanjangan ketika di lapangan. Merubah *mindset* masyarakat sangatlah sulit, ada yang kembali terlena dengan bantuan yang didapatkan, sehingga menolak untuk graduasi mandiri.

Sedangkan dari pendamping sosial tidak dapat memproses pencabutan hak KPM secara paksa tanpa ada bukti yang telah disetujui oleh koordinator wilayah, hal ini akan membawa

permasalahan ke ranah yang berbeda dari tujuan awal pengentasan kemiskinan, namun lebih bagaimana cara mengentaskan kemiskinan moral.

2) Kendala Distribusi Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) Yang Tidak Sepenuhnya Tepat

Semenjak pandemi covid-19 melanda Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya gencar untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak secara ekonomi. Pada masa tanggap darurat ini, begitu banyak bantuan sosial (bansos) yang diluncurkan oleh Pemerintah sebagai jaring penguat sosial kehidupan masyarakat bagi keluarga pra-sejahtera yang terkenda dampak pandemi covid-19. Ada 3 jenis bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Bantuan Komplementer PKH dalam bentuk BPNT Sembako, selanjutnya ada Bantuan Khusus dan Bantuan Tanggap Darurat Covid-19.

Hal demikian seharusnya tidak menjadi permasalahan jika saja sosialisasi terkait sistematika penyaluran bantuan sosial masing-masing dari ketiga bantuan tersebut dipahami dengan baik oleh masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali masyarakat yang salah paham dengan ketiga jenis bantuan yang seintas sama namun ternyata berbeda tersebut.

Selain karena sama-sama merupakan Program Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial, sekilas Bantuan Sosial PKH dan

Bantuan Khusus serta Bantuan Tanggap Darurat Covid-19 merupakan tiga program jaring penguatan dan sosial yang berbeda.

Bantuan Sosial PKH, merupakan jenis bantuan uang yang disalurkan setiap 3 bulan sekali ke rekening masing-masing KPM PKH dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai jumlah komponen yang dimiliki dalam keluarga. Selanjutnya ada Bantuan BPNT sembako yang merupakan bantuan jenis Komplementer PKH, yang diberikan dalam bentuk uang non-tunai yang tidak dapat dicairkan atau diuangkan. Transaksinya hanya dapat dilakukan di *toko agen BRILink* untuk pembelian sembako. Saldo yang tidak dapat diuangkan ini ditransferkan langsung oleh bank penyalur ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

Sedangkan, Bantuan Sosial Tanggap Darurat Covid-19 adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Pandemi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), akan tetapi bukan merupakan bagian dari penerima PKH dan bantuan Komplementer BPNT Sembako.

Untuk persamaan dan pembeda dari ketiga jenis bantuan sosial dari Kementerian Sosial ini, Sepintas lalu, ketiga jenis bantuan sosial tersebut akan dianggap sama oleh masyarakat awam. Padahal ketiga jenis bantuan tersebut berbeda secara teknis dan sasaran. Meskipun sama-sama merupakan bantuan sosial dari Program Kementerian Sosial dan sumbernya pun sama-sama dari DTKS

Terpadu, akan tetapi, ketiga jenis bantuan tersebut berbeda. Pertama ada Bantuan Sosial dari PKH, bersyarat, terdaftar di DTKS dan memiliki komponen di dalam keluarga, dicairkan setiap 3 bulan sekali dengan jumlah bantuan yang berbeda-beda setiap KPM, tergantung jumlah dari komponen yang dimiliki.

Lalu yang kedua, ada Bantuan Sembako atau yang lebih dikenal sebagai BPNT Sembako, merupakan program komplementer dari PKH, berdampingan dengan Bantuan Sosial PKH, dengan tujuan memperkuat jaringan sosial keluarga. Kemudian, ada Bantuan Tanggap Darurat Covid-19 dan PPKM, bentuknya itu sembako dan uang non-tunai yang disalurkan ke kartu KKS masing-masing penerima. Antara Bantuan PKH dan Bantuan Tanggap Darurat Covid-19 dan PPKM perbedaannya cukup jelas dan tidak menimbulkan permasalahan. Akan tetapi, pelaksanaannya di lapangan ternyata mengalami banyak hambatan. Permasalahan terjadi saat masyarakat non PKH menganggap dirinya secara otomatis mendapatkan PKH setelah mendapatkan KKS dari Bantuan Tanggap Darurat Covid-19 dan PPKM. Padahal kenyatannya tidak begitu, kedua jenis bantuan ini berbeda; secara sasaran serta cara mendapatkannya. Namun masyarakat awam yang kurang mengerti perihal pembeda ini tentunya sangat sulit untuk diberi pengertian. Penyebab dari semua ini adalah kesamaan Kartu Kesejahteraan Sosial yang diterima oleh masyarakat yang menerima PKH dan

yang menerima bantuan tanggap darurat. Sehingga demikian, masyarakat yang non-PKH merasa mereka juga bagian dari PKH dan tentunya akan melakukan aksi protes saat PKH pencairan. Kesamaan Kartu Kesejahteraan Sosial ini yang membuat rancu dan menuai permasalahan.

Penyebab kerancuan ini dikarenakan terdapat kesalahan sejak awal pada pendistribusian KKS untuk Bantuan Tanggap Darurat Covid-19 dan PPKM. Kesalahan penyaluran KKS yang sama dengan milik PKH ini mengindikasikan adanya Standar Operasional Prosedural (SOP) dan responsif pelaksana dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang terkena dampak pandemi kurang terstruktur dan kurang sistematis. Tidak saja kesamaan KKS yang dimiliki oleh penerima Bantuan Tanggap Darurat dan PPKM dengan KPM PKH menjadi permasalahan, aksi tindakan protes dan amukan masyarakat yang mendatangi kantor PPKH, Dinas Sosial, bahkan beberapa titik toko agen BRILink juga memberikan dampak bagi kinerja Pendamping Sosial di lapangan. Perhatian dan waktu para Pendamping Sosial tidak lagi hanya terfokus dalam membina KPM, tetapi juga harus memberikan penjelasan di waktu dan kondisi yang berbeda-beda pada non penerima PKH.

3) Kendala Pendataan Calon KPM PKH Yang Baru

Dalam proses pendataan calon KPM yang baru sebelum ditetapkan menjadi KPM PKH seringkali mengalami beberapa

kendala. Kendala-kendala ini selain bersumber dari Data DTKS Terpadu yang seringkali mengalami kesalahan-kesalahan yang tidak terdeteksi, namun setelah dilakukannya observasi lapangan, ditemukan sebab lain yang menyebabkan pendataan calon KPM PKH yang baru mengalami hambatan pelaksanaan. Diketahui sumber lain yang dimaksud merupakan lanjutan dari permasalahan sebelumnya terkait Bantuan Tanggap Darurat Covid-19, permasalahan tersebut yakni adanya penambahan calon KPM baru bersumber dari data hibahan non-PKH yang menerima Bantuan Sosial Tanggap Darurat Covid-19 dan PPKM.

Penambahan atau perluasan ini dilakukan secara spontan, tidak lagi melalui berbagai proses validasi lapangan. Alasan mengapa KPM Perluasan ini ada, dikarenakan banyak masyarakat yang terdampak Covid-19 perekonomiannya turun drastis sehingga masuk ke data DTKS Terpadu. Hal ini menimbulkan permasalahan lanjutan, yakni menjadi banyaknya permasalahan yang membuntuti, verifikasi lapangan tidak berjalan dengan semestinya, sosialisasi yang tidak dapat dilakukan sehingga berdampak pula pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PKH itu sendiri. Terkait permasalahan non-PKH penerima bantuan Covid-19 menjadi KPM PKH, hal tersebut berlanjut pada permasalahan lainnya. Memang jika kita telaah lagi dasarnya, niat pemerintah baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya tentunya tidak memberikan

manfaat yang optimal. Sebutan untuk KPM dari angkatan bantuan Covid-19 ini adalah KPM Perluasan Program Sembako.

Status kepersertaan mereka ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Penyaluran bantuan bagi KPM Perluasan ini juga mengalami banyak hambatan, pencairan yang lebih lambat dari KPM Reguler. Overload tampung dari toko agen BRILink, karena jumlah KPM bertambah banyak. Belum lagi prosedur validasi lapangan yang tidak dapat dijalankan dengan maksimal, sehingga banyak sekali salah sasaran terjadi. Sosialisasi tidak berjalan dengan efektif, menimbulkan banyak ketidakpahaman KPM Perluasan dengan apa itu Program PKH, serta beberapa permasalahan lainnya seperti tidak terawasi dengan baik hak dan kewajiban mereka. Dengan adanya KPM Perluasan ini, para Pendamping PKH menjadi kelebihan beban kerja.

Selain itu, informasi yang diterima sebagian besar KPM Perluasan masih parsial, tidak semua dari mereka mengetahui berapa nilai bantuan yang mereka dapatkan, mengapa jumlahnya berbeda-beda, apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai KPM PKH, kapan jadwal pencairan dan informasi lainnya. Para Pelaksana PKH sudah berusaha sebaik mungkin untuk dapat meratakan penerimaan informasi yang dimaksud, berbagai media juga telah dimanfaatkan, whatsApp grup, postingan Instagram, youtube dan *platform* lainnya. Akan tetapi, masih banyak KPM yang tidak

terjangkau sebab tidak memiliki ponsel dan kendala jaringan komunikasi lainnya.

4) Proses Pemutakhiran Data KPM Yang Berlangsung Lama

Selama Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan, hambatan juga ditemukan pada indikator pemutakhiran data. Banyak sekali KPM yang mengeluhkan kalau bantuan yang mereka dapatkan mengalami pending atau penahanan pencairan hingga tahap selanjutnya akibat pemutakhiran data yang berlangsung lama dan lambat. Pemutakhiran data sendiri memiliki dua jenis, pemutakhiran data awal dan pemutakhiran data reguler/rutin. Pemutakhiran data awal adalah sebuah proses lanjutan yang dilakukan setelah calon peserta PKH dinyatakan *eligibel* (ada komponen) dan dinyatakan resmi menjadi peserta PKH. Proses ini dilakukan setelah pelaksanaan validasi awal, melengkapi dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk kesempurnaan data hasil validasi, terutama data fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sedangkan pemutakhiran data reguler/rutin adalah pembaharuan data peserta PKH yang dilakukan setiap saat dan terus menerus sesuai kondisi terkini peserta PKH. Hasil pemutakhiran ini akan berpengaruh pada jumlah bantuan, terutama sekali untuk komponen kesehatan dan pendidikan.

Tidak saja pemutakhiran data awal mengalami hambatan di KPM Perluasan, pemutakhiran data reguler/rutin untuk KPM lama

juga mengalami hambatan di hasil verifikasi. Karena lambatnya proses pemutakhiran data reguler ini (hasil dari pemutakhiran data reguler biasanya adalah naik jenjang untuk komponen yang sama atau berakhirnya bantuan komponen sebab peralihan jenjang, menyebabkan banyak keluhan dari KPM yang masuk ke dalam kotak pengaduan di Kantor PKH dan Dinas Sosial.

Lebih lanjut, setelah observasi lapangan dilakukan, ditemukan sumber lain yang menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi proses pemutakhiran data yang berlangsung lama ini. Salah satu penyebab yang dimaksud adalah ketidaksinkronan data NIK dari komponen yang bersangkutan dengan data yang ada di DTKS, sehingga kemudian tidak terbaca dan menyebabkan bantuan yang diterima menjadi pending. Perlu dilakukannya pembenahan terlebih dahulu dengan DISDUKCAPIL agar status bantuan pending tadi dapat dicairkan.

Selanjutnya, sumber penyebab lainnya adalah masih banyak KPM yang abai dengan kelengkapan administrasi, atau data administrasi hilang di sistem (*error*). Ketidaklengkapan administrasi ini akan berimbas pula pada status invalid jika data yang ada di PKH dipadankan dengan DISDUKCAPIL dan menghasilkan ketidaksesuaian, yang berujung nantinya akan berpengaruh pada terlambatnya pencairan bantuan.

b. Hambatan Sebab Eksternal

Selain dari pada faktor internal, hambatan atau tantangan penyaluran dana bantuan sosial PKH juga disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu sebagai berikut.

1) Kurangnya Pemahaman Dari Para Keluarga Penerima Manfaat Terhadap Hak Dan Kewajiban PKH

Program Keluarga Harapan adalah sebuah program yang memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup KPM dengan berbagai fokus dalam aspek kehidupan, seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan juga bantuan ekonomi. Akan tetapi, setelah observasi dan wawancara dilakukan di 7 (tujuh) desa di Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, peneliti menemukan kelemahan dari program ini. Program Keluarga Harapan (PKH) diketahui tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Meskipun bantuan PKH pelaksanaannya diatur dan dijalankan oleh Pendamping Sosial sebagai tonggak utama, juga adanya materi peningkatan kualitas hidup yang diberikan guna mengedukasi KPM terhadap bagaimana kiat-kiat agar dapat hidup secara mandiri tanpa bergantung lagi pada bantuan pemerintah. Program ini bergerak dengan sifat *top to down*, dimana partisipasi masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, dan dari masyarakatnya sendiri pun sangat sulit dikordinasikan untuk dapat mengikuti arahan dengan baik.

Misalkan saja, sesuai dengan temuan saat wawancara secara langsung dengan para penerima manfaat yang peneliti lakukan, perihal sosialisasi atau pertemuan kelompok, tidak sedikit KPM yang tidak berhadir dengan berbagai alasan, seperti sibuk bekerja, sakit dan segala macam alasan lainnya. Akan tetapi, ketika pencairan diumumkan, mereka berbondong-bondong untuk menjadi paling cepat dalam mengakses bantuan dan itupun tidak dilakukan secara mandiri, melainkan dari kebanyakan KPM hanya mengandalkan bantuan dari pendamping sosial ataupun ketua kelompoknya agar dapat segera mendapatkan uang dari hasil pencairan secara kolektif, bahkan tak jarang para penerima manfaat justru meminta bantuan kepada pemilik toko agen BRILink. Hal ini menimbulkan banyak penyalahgunaan keadaan terjadi akibat kurangnya pemahaman para penerima manfaat akan informasi dan teknologi yang berlaku demi menunjang keberhasilan dari tujuan PKH. Tidak hanya itu saja, seringkali KPM juga abai terhadap kewajiban dari komponen yang mereka miliki. Misalkan saja, komponen kesehatan, balita, masih banyak kasus dimana si pengurus komponen (orangtua dari balita yang menjadi komponen), tidak rutin menjalankan kewajibannya dalam mengecek kesehatan si balita ke pelayanan kesehatan. Setelah ditelusuri penyebab-penyebab dari rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat ini melalui observasi dan wawancara, ditemukan beberapa sebab

seperti, rendahnya pemahaman mereka terkait apa itu PKH, serta hak dan kewajiban mereka sebagai KPM.

Faktor lainnya dikarenakan *audiens* dari Pendamping Sosial kebanyakan adalah orangtua, tidak jarang mereka sebagai Pendamping Sosial mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan seperti misalnya dianggap menggurui atau disebut yang tidak-tidak dikarenakan KPM merasa diperintah ini itu oleh yang lebih muda. Banyak tantangan terkait hal ini, dan perlu durasi yang panjang untuk menyamaratakan tingkat partisipasi dan pemahaman seluruh KPM di Kec. Tigaraksa pada satu titik yang sama. Niat, ide serta tindakan selalu diupayakan demi dapat meningkatkan rendahnya partisipasi dan pemahaman mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) kepada seluruh KPM di Kec. Tigaraksa.

2) Kendala Teknis yang Terjadi Pada Saat Penyaluran Bantuan Sosial dan Komplementer

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Tigaraksa jika dikaitkan dengan indikator penyaluran bantuan sosial maupun komplementer, banyak sekali mengalami kendala baik yang sifatnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat maupun lama. Kendala teknis yang ditemukan pada saat penyaluran bantuan sosial maupun komplementer seringkali berkisar pada terlambatnya pencairan bantuan sosial atau bahkan saldo kosong di rekening

KPM. Kendala secara teknis, Bantuan Sosial akan mengalami kendala pencairan karena sebab-sebab berikut, diantaranya, adanya sinkronisasi data DISDUKCAPIL dengan DTKS, pemutakhiran data yang berlangsung dalam durasi yang lama, atau bahkan data administrasi yang mengalami *error* karena hilang di sistem atau juga karena tidak diperbarui. Sedangkan, untuk kendala pencairan dari bantuan Komplementer BPNT Sembako disebabkan oleh permasalahan toko agen BRILink yang kelebihan tampungan KPM yang ingin mencairkan bantuan, mesin gesek ATM yang rusak, ATM rusak, saldo di rekening kosong, sampai pada permasalahan ATM yang hilang. Meskipun dalam penyaluran seringkali terjadi kendala yang demikian, akan tetapi jenis kendala seperti ini sudah sangat sering terjadi, dan penyelesaiannya pun dapat terkondisikan dengan baik serta kendala-kendala serupa sudah menjadi langganan setiap kali pencairan berlangsung.

3) Peraturan Dan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial PKH Yang Kurang Memberikan Dampak Pemahaman Secara Masif Kepada Seluruh Keluarga Penerima Manfaat

Hambatan lainnya datang dari sisi landasan hukum dari pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial PKH itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dari adanya temuan saat peneliti melakukan penelitian kepustakaan terhadap dasar hukum penyaluran dana bantuan sosial PKH, antara lain yaitu peraturan mengenai PKH

yang terkesan terburu-buru diberlakukan tanpa adanya pemeriksaan ulang terhadap isi dari peraturan-peraturan yang tertuang dalam aturan tersebut, hal ini dibuktikan dari seringnya aturan tersebut berganti meskipun bertujuan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, namun hal itu tidak dibarengi dengan pemberian pengetahuan keberlanjutan secara masif kepada para penerima manfaat, dapat dilihat dari Keputusan Dirjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang mengalami perubahan pertama dengan diterbitannya Keputusan Dirjen Perlindungan Sosisal Nomor : 04/LJS/08/2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Dirjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Lalu, pada tahun 2019 muncul aturan baru dengan diberlakukannya Keputusan Dirjen Perlindungan Sosisal Nomor : 03/LJS/01/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019, terakhir berlakunya Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024. Pergantian-pergantian aturan petunjuk tekniis ataupun pedoman pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH terkesan bertele-tele dan tidak tepat sasaran, serta terkesan hanya *mubazir*, mengingat biaya dari pembentukan setiap aturan yang berlaku itu memerlukan

biaya yang tidak murah. Selanjutnya, kurangnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PKH, ini dibuktikan dengan sebagian besar penerima manfaat tidak paham tentang apa itu PKH, apa tujuan adanya PKH, sampai dengan pemberian bantuan PKH yang kurang tepat sasaran menimbulkan berbagai macam permasalahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.

Berikutnya adalah tidak efektifnya pelaksanaan pembukaan rekening para keluarga penerima manfaat yang telah tercantum dalam setiap petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial PKH. Tertulis jelas bahwa pembukaan rekening keluarga penerima manfaat PKH dilakukan secara kolektif (*bulk account opening*). Bagi peneliti, pembukaan rekening secara kolektif ini adalah salah satu penyebab adanya hambatan-hambatan yang terjadi di atas, karena dengan begitu para keluarga penerima manfaat tidak dapat merasakan arti sebenarnya dari adanya PKH ini diberlakukan dan diberikan. Hal lainnya dari dampak diberlakukannya pembukaan rekening secara kolektif ini yaitu tidak terlaksananya prinsip-prinsip perbankan secara umum yaitu prinsip kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*), prinsip kehati-hatian (*fiduciary principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*) dan khususnya prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).

Sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan lembaga perbankan seharusnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah (*Know Your Customer Prinsip*) Pasal 2 ayat (1), yaitu Bank wajib menerapkan Prinsip Menengenal Nasabah (*Know Your Costomer Principle*).

4) Tidak diberlakukan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Perbankan Terhadap Nasabah Penerima Manfaat PKH

Walaupun, terdapat asas hukum yang berlaku sebagai dasar acuan pemerintah dalam memberlakukan suatu peraturan, yaitu asas *lex posterior derogat legi priori* yang berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki. Karena jika dilihat dari hierarki Peraturan Bank Indonesia dan Keputusan Dirjen Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial berada pada kasta yang sederajat, namun peneliti melihat ketidaktepatan pemberlakuan aturan dalam Keputusan Dirjen Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan

Sosial PKH mengenai pembukaan rekening secara kolektif (*bulk account opening*) menyebabkan ketidaksinkronan aturan ini dengan aturan lainnya, khususnya PBI tentang prinsip mengenal nasabah.

Meski terdapat beberapa hambatan seperti contohnya yang dijelaskan dalam Pasal 17 PBI Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, berbunyi:

"Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Nasabah baik memiliki rekening di Bank dalam hal nilai transaksi yang dilakukan melebihi Rp. 100.000.000,000 (seratus juta rupiah) atau nilai yang setara dengan itu".

Dari isi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bank berkewajiban melaksanakan prinsip mengenal nasabah kepada siapapun yang menggunakan jasa bank. Dalam hal ini bukan hanya nasabah bank saja yang wajib diketahui seluk beluknya, namun bank juga wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah kepada pihak-pihak yang berstatus sebagai non-nasabah. transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak non-nasabah yang diantaranya seperti transaksi *transfer* uang, karena transaksi *transfer* yang disebut dapat dilakukan oleh siapapun, baik oleh yang berstatus sebagai nasabah ataupun non-nasabah. Oleh karena itu, bank diwajibkan menerapkan prinsip mengenal nasabah untuk menghindari serta meminimalisir terjadinya transaksi-transaksi yang merugikan.

Namun, dari Pasal 17 tersebut, juga ditemukan suatu kerancuan lain, yaitu pada bagian "...dalam hal nilai transaksi yang melebihi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilai yang

setara dengan itu". Dalam penggalan Pasal 17 tersebut menunjukkan bahwa transaksi-transaksi yang bernilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juga rupiah) saja yang diwajibkan bagi bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah. Tetapi, kita tidak dapat memisahkan pasal tersebut bagian demi bagian, karna dalam satu pasal adalah suatu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. Artinya, hanya pihak-pihak non-nasabah yang wajib diterapkan prinsip mengenal nasabah dalam hal transaksi yang dilakukannya melebihi Rp.100.000.000,00 (seratus juga rupiah). Dengan begitu, disimpulkan bahwa nasabah-nasabah yang terdaftar secara sah yang melalui proses identifikasi nasabah yang dilakukan oleh bank yang sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening, seperti yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) PBI Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah :

Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi mengenai:

- a. Identitas calon nasabah;
- b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank;
- c. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah; dan
- d. Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 6.

Walaupun nasabah tersebut hanya melakukan transaksi dengan jumlah kecil, bank wajib melaksanakan prinsip mengenal nasabah. Seperti contohnya dalam kegiatan transaksi yang dilakukan

oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Oleh karena itu, peneliti mengisyaratkan harus adanya suatu konstruksi baru guna menyelaraskan aturan yang satu dengan aturan yang lain, khususnya guna menyelaraskan Peraturan Bank Indonesia Tentang Prinsip Mengenal Nasabah dengan keputusan Dirjen Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Tentang Petunjuk Teknis / Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial PKH yakni dengan konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam penyaluran dana bantuan program keluarga harapan. Ini dilakukan dengan mengedepankan kepentingan khalayak orang banyak juga tidak lupa mengindahkan hak dan kewajiban seluruh elemen pendukung pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH baik elemen pemerintah ataupun elemen masyarakat sebagai penerima manfaat, serta hal ini juga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan para oknum pencari keuntungan pribadi terhadap masyarakat rentan, seperti kemiskinan, ibu hamil, anak, lansia, beban ekonomi lemah, beban sosial, beban psikologi, dan lain-lain.

c. Hambatan Menurut Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Tigaraksa, jika dikaitkan dengan indikator Pendamping Sosial, masih

banyak sekali mengalami kendala atau hambatan jika ditinjau dari segala macam aspek. Setelah observasi dan wawancara dilakukan, peneliti menemukan kendala dari Pendamping Sosial dengan pengaruh paling besar, dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kec. Tigaraksa. Kendala yang dimaksud adalah kurangnya jumlah Pendamping Sosial yang ada di Kec. Tigaraksa. Sebagai Kecamatan dengan jumlah KPM terbanyak selama kurun waktu dua tahun sejak tahun 2018-2019, Pendamping Sosial yang ada di Kec. Tigaraksa hanya terdiri dari 5 orang, bahkan wilayah kerja mereka tidak terfokuskan pada satu wilayah, melainkan dua sampai tiga desa dipegang oleh satu Pendamping Sosial. Di Kec. Tigaraksa jumlah binaan setiap Pendamping Sosial tidak terbagi dengan rata, ditambah dengan jangkauan mereka terhadap setiap KPM tidak berada dalam satu desa yang sama atau terpecah. Hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri bagi para Pendamping Sosial untuk mendampingi KPM di setiap wilayah. Selain dikarenakan mereka harus menuju ke tempat tinggal KPM dengan transportasi sendiri, mereka kadang juga harus mengeluarkan uang lebih untuk biaya transportasi apabila uang transportasi mereka tidak dicairkan dengan segera. Kendala selanjutnya adalah, Pendamping Sosial diharuskan menghapal jalan dan rumah setiap KPM untuk diberikan dampingan atau binaan selama Pandemi Covid-19. Jika sebelum Pandemi Covid-19, pertemuan kelompok bersifat berkumpul di ruang aula besar seperti Masjid atau bahkan

rumah salah satu KPM yang memiliki halaman yang luas, maka selama Pandemi Covid-19 lalu, para Pendamping Sosial di Kec. Tigaraksa memilih alternatif dari pintu ke pintu untuk pemberian sosialisasi serta hal lainnya yang berhubungan dengan program. Pendamping Sosial tidak saja berurusan dengan satu dua orang KPM dalam satu harinya, tapi jika setiap kali mereka ada kegiatan lapangan, maka durasi waktu yang dibutuhkan juga tidaklah sebentar. Bahkan untuk menyelesaikan satu kegiatan lapangan, Pendamping Sosial membutuhkan waktu sehari-hari untuk menuntaskan semua KPM binaan. Masih sering pula terjadi kasus KPM pindah alamat tanpa memberi laporan ke Pendamping Sosial, sehingga hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan tambahan untuk Pendamping Sosial mencari tahu alamat rumah KPM bersangkutan. Kurangnya jumlah dari Pendamping Sosial yang ada juga menjadi hambatan paling besar dan berpengaruh bagi pelaksanaan PKH di Kec. Tigaraksa.

Namun, ada juga hambatan lain seperti sebagian para KPM yang meminta bantuan untuk diambilkan uang PKH nya ketika waktu pencairan tiba dengan alasan bahwa mereka tidak paham dengan mekanisme perbankan khususnya tata cara pengambilan uang di ATM atau di toko agen BRILink. Disini, terkadang timbul beberapa masalah yaitu berupa kesalahpahaman antara KPM dengan pendamping sosial yang dimintai bantuan untuk mengambil uang PKH, terkadang ada beberapa KPM yang di rekeningnya tidak ada saldonya atau bahkan

jumlah uang di rekening kurang dari yang sebelumnya didapat. Hal ini disebabkan para KPM tidak paham adanya perubahan status data penerima dan keterlambatan proses penyaluran bantuan sosial PKH oleh bank penyalur yaitu Bank BRI, dalam hal ini Bank BRI Cabang Tigaraksa.

Hambatan selanjutnya, yaitu pada saat pencairan terkadang uang yang berada di ATM habis, jadi pendamping sosial bersama ketua kelompok harus mencari ATM atau toko agen BRILink yang jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggal para KPM.

2. Hambatan Penerapan Konstruksi Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Program Keluarga Harapan

Dari penelitian dan observasi yang peneliti lakukan, dalam implementasi konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam program keluarga harapan (PKH), terdapat beberapa hambatan atau tantangan yang dapat dihadapi, khususnya terkait dengan identifikasi kebutuhan dan kondisi keluarga penerima manfaat. Bersumber dari analisis dan evaluasi implementasi prinsip mengenal nasabah guna kepentingan program keluarga harapan, laporan-laporan kinerja tahunan Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta studi-studi akademis atau penelitian terkait implementasi prinsip mengenal nasabah dalam program keluarga harapan, beberapa diantaranya, yaitu :

a. Keterbatasan Data

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan data yang tersedia untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi keluarga penerima manfaat dengan akurat. Data yang tidak lengkap atau tidak diperbarui dapat menyulitkan proses identifikasi dan verifikasi penerima manfaat yang sesuai.

b. Kesesuaian Kriteria

Terkadang, kriteria yang ditetapkan untuk menjadi penerima manfaat PKH mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh keluarga yang rentan. Misalnya, beberapa keluarga yang membutuhkan bantuan mungkin tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, sementara yang lain mungkin tidak membutuhkan bantuan tetapi memenuhi kriteria.

Data yang digunakan untuk identifikasi keluarga penerima manfaat PKH mungkin tidak selalu lengkap atau akurat. Ini dapat terjadi karena kurangnya pemutakhiran data secara berkala, atau karena adanya kesenjangan dalam pelaporan dan pengumpulan data ditingkat lokal.

c. Ketidakmampuan Identifikasi Kebutuhan Yang Komprehensif

Proses identifikasi kebutuhan keluarga dapat sulit dilakukan secara komprehensif karena banyaknya faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Keterbatasan waktu, sumber daya, dan kemampuan teknis dapat menjadi hambatan dalam memahami kebutuhan secara menyeluruh.

d. Keterbatasan Akses dan infrastruktur

Keluarga yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses program PKH. Hal ini dapat mengakibatkan kelompok rentan tertentu tidak terjangkau oleh program, sehingga memengaruhi identifikasi dan penyaluran bantuan.

Di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, akses terhadap data dan infrastruktur komunikasi dapat menjadi hambatan. Hal ini dapat memperlambat atau menghambat proses identifikasi dan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH.

e. Kurangnya Kesadaran, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya

Kurangnya kesadaran tentang program keluarga harapan dan hak-hak penerima manfaat dapat menghambat identifikasi keluarga yang memenuhi syarat untuk penerima bantuan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses identifikasi dan monitoring juga penting untuk memastikan akurasi dan keberlanjutan program.

Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi dapat menjadi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah secara efektif. Misalnya, keterbatasan petugas lapangan, atau peralatan teknologi informasi yang memadai dapat mempengaruhi

kemampuan untuk melakukan identifikasi dan pemutakhiran data dengan baik.

f. Kegagalan Dalam Pembaruan Data

Data mengenai kondisi dan kebutuhan keluarga perlu diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang masih memenuhi syarat. Kegagalan dalam pembaruan data secara teratur dapat menyebabkan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

g. Kesulitan Menjangkau Kelompok Rentan

Kelompok-kelompok yang sangat rentan seperti keluarga miskin, ibu hamil, anak-anak, dan lansia seringkali sulit untuk dijangkau dan diidentifikasi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor geografis, sosial, atau ekonomi yang membuat mereka termarginalkan dari akses terhadap layanan dan program-program bantuan.

Mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan akurasi identifikasi, pembaruan data secara berkala, serta meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam program PKH.

Selain itu, secara lebih tegas untuk dapat mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah oleh perbankan terhadap seluruh keluarga penerima manfaat dibutuhkan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, yakni dengan mengadakan konstruksi peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai

dan relevan guna mencapai keselarasan antara peraturan satu dengan yang lainnya demi tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya manusia yang maju dan berkompeten.

C. Penyelesaian Penyalahgunaan Keadaan Keluarga Penerima Manfaat PKH Melalui Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Penerapan konstruksi prinsip mengenal nasabah dapat memberikan Solusi dan langkah-langkah preventif yang efektif untuk mengatasi risiko penyalahgunaan dana bantuan yang mungkin terjadi pada kelompok sasaran program keluarga harapan (PKH). Berikut adalah beberapa Solusi dan Langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan :

1. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran dana bantuan PKH adalah Langkah preventif yang sangat penting. Dengan memantau secara teratur, pihak yang berwenang dapat mendeteksi pola-pola anomali atau potensi penyalahgunaan dana bantuan. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan masih sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemantauan ini dapat dilakukan dengan mengadakan kunjungan lapangan, survei atau interaksi langsung dengan keluarga penerima manfaat.

2. Verifikasi Data Yang Ketat

Menjalankan proses verifikasi data yang ketat pada awal pendaftaran dan secara berkala selama program berlangsung dapat membantu memastikan keabsahan dan keakuratan informasi yang diberikan oleh penerima manfaat. Ini termasuk pengecekan secara langsung terhadap informasi yang diberikan, seperti kondisi rumah tangga, pendapatan dan faktor-faktor lain yang relevan. Verifikasi identitas calon penerima bantuan secara ketat dengan memeriksa dokumen resmi seperti kartu identitas penduduk, akta kelahiran atau dokumen lain yang sah. Ini membantu memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada individu atau keluarga yang memang berhak menerimanya.

3. Penggunaan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem database terpusat yang terintegrasi dan aplikasi berbasis online untuk pelaporan dan monitoring, dapat mempermudah pengelolaan dan pemantauan program. Teknologi ini dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola penyalahgunaan atau kecurangan secara lebih efisien.

4. Pelatihan Bagi Petugas Lapangan

Memberikan pelatihan kepada petugas lapangan yang terlibat dalam penyaluran bantuan untuk mengenali tanda-tanda potensi penyalahgunaan dan kecurangan. Mereka juga perlu diberi

pemahaman yang mendalam tentang prinsip mengenal nasabah dan pentingnya melaksanakan tugas mereka dengan etika yang tinggi.

5. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pemantauan program dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Masyarakat dapat menjadi sumber informasi yang berharga tentang potensi penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam penyaluran dana bantuan.

6. Kolaborasi Dengan Pihak Eksternal

Melibatkan pihak eksternal, seperti lembaga keamanan, lembaga keuangan, atau lembaga pengawas untuk mendukung proses pengawasan dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan dana bantuan. Kolaborasi ini dapat membantu meningkatkan keefektifan dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran.

7. Sanksi dan Penegakan Hukum

Menetapkan sanksi yang tegas dan memberlakukan penegakan hukum terhadap individu atau kelompok yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana bantuan. Langkah ini dapat menjadi deterrent bagi mereka yang berniat melakukan tindakan yang melanggar aturan.

Dalam perihal konstruksi prinsip mengenal nasabah dalam program keluarga harapan yang mana peneliti telah menjelaskan bahwa perlu adanya pembaharuan terkait peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keduanya. Dimana peneliti mendapatkan ketidaksinkronan antara Keputusan Dirjen Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial PKH mengenai pembukaan rekening secara kolektif (*bulk account opening*) menyebabkan ketidaksinkronan aturan ini dengan aturan lainnya, khususnya Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah. Pada pasal 17 PBI tentang prinsip mengenal nasabah dijelaskan bahwa bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah terhadap nasabahnya, tidak pandang bulu dan tidak memandang besar atau kecilnya transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Dapat dilihat juga pada Pasal 4 ayat (4) PBI tentang prinsip mengenal nasabah bahwa bank wajib melakukan pertemuan dengan nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.

Namun, dalam konteks penyaluran dana bantuan sosial ini tidak dilaksanakan demikian. Tidak adanya pemberlakuan prinsip mengenal nasabah yang karena oleh Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial PKH diberlakukan pembukaan rekening secara kolektif (*bulk account opening*) dan ketika kartu ATM atau Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) dan buku tabungan itu telah selesai dibuat, dilaksanakan pembagian secara kolektif juga. Ini artinya, bank penyalur dana bantuan sosial PKH tidak melaksanakan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.

Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga perbankan penyalur dana bantuan sosial program keluarga harapan. Dalam hal ini di atur sanksi-sanksi yang tercantum

dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berbunyi :

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi-tingginya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dari sini dapat kita lihat bahwa kesempatan-kesempatan penyalahgunaan keadaan yang dalam hal ini adalah kemiskinan, ibu hamil, anak-anak, lansia, dan individu yang memiliki beban ekonomi, sosial, dan psikologis dapat terjadi dengan adanya ketidaksinkronan dan ketidaksinambungan antara masing-masing aturan yang saling berkaitan. Oknum-oknum para pencari keuntungan pribadi dari penyalahgunaan keadaan ini dapat dengan mudah melancarkan aksinya. Seperti halnya contoh kasus yang telah terjadi di daerah dimana peneliti melakukan penelitian, telah terjadi kasus korupsi senilai kurang lebih 450 juta yang dilakukan oleh oknum Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan periode penyaluran dana bantuan sosial PKH tahun 2018-2019. Kasus ini peneliti alami sendiri saat sedang melaksanakan tugas magang di Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kab. Tangerang pada tahun 2020 lalu. Peneliti ikut serta dalam proses penyelidikan dugaan

tindak pidana korupsi dana bantuan sosial PKH Tahun 2018-2019 di Kecamatan Tigaraksa tersebut. Dari hasil penyelidikan ini Kejaksaan Negeri Kab. Tangerang melakukan temuan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 2 (dua) orang terpidana yang keduanya sama-sama dari unsur pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH).